

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara sangat berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Peranan penting dari penerimaan pajak adalah penyediaan dana bagi pembiayaan pembangunan nasional dan juga mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman dari luar negeri. Penerimaan pajak juga berguna dalam mendukung dan mempercepat proses pembangunan di daerah yang juga merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan nasional.

Saat ini masih banyak masyarakat yang belum benar-benar paham akan peran penting pajak bagi pembangunan nasional. Hal ini akan menjadi hambatan bagi pemungutan pajak yang akan berdampak negatif bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu maka pemerintah perlu memberi himbauan dan sosialisasi bagi masyarakat, agar masyarakat ikut berperan aktif dalam pembayaran pajak mereka.

Di Indonesia terdapat beberapa jenis pajak. Namun, apabila ditinjau dari pemungutnya, maka akan ada 2 (dua) golongan, yaitu Pajak Pusat (Negara) dan Pajak Daerah. Pajak Pusat (Negara) adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, contohnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Sedangkan pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, contohnya seperti Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Sarang Burung Walet dan sebagainya.

Salah satu potensi yang cukup besar pada sektor pajak adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor. Yang dimaksud

kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) dan Samsat Kota Semarang I yang berkedudukan di bawah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) merupakan instansi yang berwenang untuk memungut pajak kendaraan bermotor di Kota Semarang. Pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UP3AD dan Samsat Kota Semarang I harus melalui beberapa prosedur administrasi yang telah ditetapkan. Prosedur tersebut merupakan landasan tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor mulai dari pendataan dan pendaftaran kendaraan bermotor hingga pengembalian kelebihan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Saat ini UP3AD dan Samsat Kota Semarang I juga terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, misalnya melalui penagihan dengan kegiatan *door to door*. Selain bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, penagihan pajak kendaraan bermotor dengan kegiatan *door to door* juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sebelum jatuh tempo pembayaran.

Saat ini, laju pertumbuhan kendaraan bermotor di Jawa Tengah pada umumnya dan di Kota Semarang pada khususnya sangat pesat. Hal tersebut merupakan indikasi besarnya potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Di samping itu masih banyak pula warga masyarakat yang masih enggan untuk melunasi pajak kendaraan bermotornya. Oleh karena itu UP3AD dan Samsat Kota Semarang I sebagai instansi yang berwenang memungut pajak kendaraan bermotor harus terus melakukan upaya-upaya atau strategi untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan

bermotor secara intensif. Dari uraian di atas penulis mengangkat judul **“TINJAUAN ATAS PROSEDUR ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UP3AD DAN SAMSAT KOTA SEMARANG I”**

1.2. Ruang Lingkup Penulisan

Agar pembahasan masalah tidak terlalu luas dan menyimpang dari judul dan tujuan yang telah ditetapkan serta adanya keterbatasan waktu, dana, dan kemampuan dimiliki oleh penulis, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan dalam penulisan tugas akhir ini. Batasan-batasan ruang lingkup tersebut meliputi :

1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Landasan Hukum Pajak Kendaraan Bermotor;
3. Subjek, Objek, Dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor;
4. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif, dan Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor;
5. Prosedur Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor;
6. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor;
7. Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor;
8. Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah :

- a. Untuk mengetahui secara langsung upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di UP3AD dan Samsat Kota Semarang I.
- b. Untuk membandingkan antara teori yang diperoleh dari perkuliahan dengan praktik yang sebenarnya di lapangan.

1.3.2. Kegunaan Penulisan

Kegunaan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah :

a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada Program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

b. Bagi Akademisi

Sebagai bahan referensi dan pertimbangan bagi mahasiswa yang akan menyusun laporan tugas akhir.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai gambaran bagi masyarakat mengenai pajak kendaraan bermotor (PKB).

1.4. Metode Pengumpulan Data

1.4.1. Data Penelitian

Dalam penyusunan suatu laporan penelitian dibutuhkan data yang lengkap, relevan dan obyektif serta merupakan data yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun jenis data yang dapat digunakan dalam penulisan tugas akhir ini dapat dikelompokkan, yaitu sebagai berikut.

a. “Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya”.
(Marzuki, 2005:60)

Berdasarkan pengertian data primer di atas, data yang dibutuhkan dalam penulisan Tugas Akhir ini yaitu berupa :

1. Gambaran umum mengenai UP3AD dan Samsat Kota Semarang I;
2. Data mengenai target dan realisasi, serta upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor; dan
3. Formulir-formulir yang digunakan untuk kegiatan di UP3AD dan Samsat Kota Semarang I.

- b. “Data Sekunder adalah data yang bukan dusahkan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya diambil dari biro statistik, dokumen-dokumen perusahaan atau organisasi, surat kabar dan majalah, ataupun publikasi lainnya”. (Marzuki, 2005:60)

Berdasarkan pengertian data sekunder di atas, data yang dibutuhkan dalam penulisan Tugas Akhir ini yaitu berupa.

1. Landasan hukum pajak kendaraan bermotor;
2. Pengertian pajak kendaraan bermotor;
3. Subjek, objek, dan wajib pajak kendaraan bermotor
4. Dasar Pengenaan Pajak (DPP), tarif, dan perhitungan pajak kendaraan bermotor; dan
5. Prosedur administrasi pajak kendaraan bermotor.

1.4.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penusunan laporan tugas akhir ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain :

- a. Metode Observasi

“Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki tanpa mengajukan pertanyaan-pertanyaan meskipun objeknya orang” (Marzuki, 2005:62). Jika pengamatan dilakukan dengan sambil lalu dan tidak memenuhi prosedur dan aturan yang jelas, maka hal tersebut tidak dapat disebut observasi. Metode observasi yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada objek pengamatan. Dalam hal ini adalah upaya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor di UP3AD Samsat Kota Semarang I.

- b. Metode Wawancara

“Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara

sistematik dan berlandaskan tujuan penelitian” (Marzuki, 2005:66). Dalam wawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dan responden. Dalam hal ini dilakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak instansi yaitu Bapak Ridimanjaya, S. Sos., M. Si., selaku Kepala Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

c. Metode Studi Pustaka

Metode studi pustaka merupakan cara pengumpulan data dengan mengambil informasi dari sebuah literatur yang ada kaitannya dengan judul, kesimpulan para ahli sebagai penuntun untuk menuju pada suatu sasaran yang sedang diteliti. Metode studi pustaka ini dilakukan dengan cara membaca dan mencatat informasi dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan penulisan laporan tugas akhir serta data-data yang disimpan sebagai arsip perusahaan.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai penulisan tugas akhir ini, maka perlu disampaikan sistematika penulisan. Sistematika penulisan adalah gambaran umum mengenai masalah yang akan diuraikan dalam tugas akhir ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang pemilihan judul, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan kegunaan penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum pada UP3AD dan Samsat Semarang I yaitu tentang Sejarah Terbentuknya, Dasar Pelaksanaan Tugas, Tugas Pokok, Visi, Misi, Motto, Kebijakan Mutu, Janji Pelayanan, Wilayah Kerja,

Struktur organisasi, Sarana dan Prasarananya, serta Layanan yang diberikan kepada wajib pajak.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Landasan Hukum Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Subyek dan Objek serta Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Dasar Pengenaan, Tarif, dan Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Prosedur Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Upaya serta Kendala dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada UP3AD Samsat Kota Semarang I.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan bagian akhir dari penulisan laporan tugas akhir ini, yaitu berupa kesimpulan yang dapat memberikan gambaran tentang Prosedur Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi pembaca.